# PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(Survey Pada Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung)**

***THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM TO THE QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THEIR IMPLICATIONS FOR PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERMENT AGENCIES***

**Oleh**
**Anita Ugun**
**21110170**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

## ABSTRACT

*The Systems and procedures in Financial Management for Local Governments are not used. so the management, administration, and financial accountability area become disorderly. Bookkeeping, reporting, and inadequate accountability. Due to the financial transactions have not been fully accounted for in the financial statements. The process of preparation of the report is not in accordance and preparation of financial statements that are not entirely in local government refers to the Government Accounting Standards.*

*Statistical test to be used is through path analysis and correlation calculation. Because the data used in this study is a data entire population or census, the significance test was not performed.*

*Based on the results of the study indicate that the regional financial information system affects the quality of financial statements. And the financial effect on the quality of performance accountability of government agencies.*

***Keywords:*** *Regional Financial Information System, Quality of Financial Statements, Performance Accountability of Government Agencies.*

## I. Pendahuluan

Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan, dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang

dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai, adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga PEMDA menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan. (Kepala perwakilan BPKP provinsi Jabar Tahria Syafrudin,2012).

Adapun manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Seberapa besar pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Seberapa besar kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini daimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami teori-teori dan asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Serta untuk mengetahui pengaruh SIKD terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya erhadap akuntabilitas kinerja. Dari beberapa masalah yang dikemukaan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Adapun kegunaan penelitian yaitu yaitu Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut.

## II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah

"Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer." (Bastian:2006)

"Suatu aplikasi yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis dilingkungan instansi atau lembaga." (M.Taufik:2013)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah atau yang disingkat menjadi SIKD adalah suatu aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

### 2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

"Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan". (Sofyan Syafri Harahap,2009:146)

"Suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya." (Masmudi:2008)

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

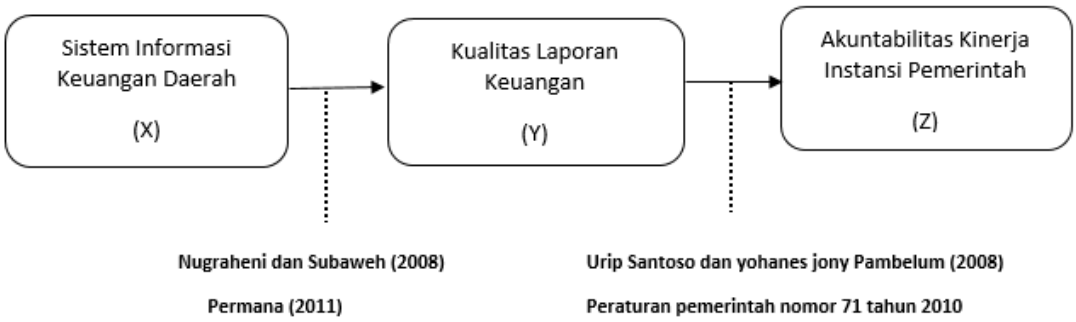
### 2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

"Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban." (LAN & BPKP:2001)

"Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. (Mahmudi,2010:37)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditari kesimpulan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertia tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran




## 2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_1$ :Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

$H_2$ :Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

# III. Objek dan Metode Penelitian

## 3.1 Objek Penelitian

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu". Husein Umar (2005:303)

## 3.2 Metode Penelitian

"Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi". Sugiyono (2008:147).

### 3.2.1 Desain Penelitian

"Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan" Jonathan Sarwono (2006:79)

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu.

### 3.2.2 Operasional Variabel

"Variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan" Sugiyono (2009:38)

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas *(Independent Variable)*

Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (X).

*2.* Variabel Penghubung *(Intervening Variable)*

Variabel penghubung yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

*3.* Variabel Terikat *(Dependent Variable)*

Variabel terikat yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Z).

Dalam penelitian ini digunakan uji coba angket atau kuesioner yang diharapkan sebagai alat ukur penelitian yang digunakan untuk mencapai kebenaran atau mendekati kebenaran, sehingga dari kuesioner ini diharapkan data utama yang berhubungan dengan masalah penelitian dapat terpecahkan.

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Pengertian skala ordinal Menurut Juliansyah Noor (2011:126) adalah sebagai berikut:

"Skala ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek ata individu tertentu".

Berdasarkan pengertian diatas, skala ordinal digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan skala *likert*. Semua Variabel diukur oleh instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*. Skala *likert* menurut Juliansyah Noor (2011:128) yaitu :

"Merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan".

## 3.5 Alat Ukur Penelitian

### 3.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. Menurut *Cooper* (2006: 720) validitas dapat diartikan sebagai:

"Suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur"

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Yaitu adanya derajat ketepatan atau keakuratan yang di tunjukkan oleh instrument penelitian. Teknik uji yang digunakan teknik korelasi belah dua dari Untuk mengukur reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan metode Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut ini :

$$4.\quad r = \frac{k}{k-1}\frac{(1-\Sigma\sigma i^2)}{\sigma^2}$$

Dimana :

r = Koefisien realibilitas yang dicari

k = Jumlah butir pertanyaan

$\Sigma\sigma i^2$ = Varians butir-butir pertanyaan

$\sigma^2$ = Varians skor tes

Varians butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sigma i^2 = \frac{\Sigma Xi - (\frac{\Sigma Xi^2}{n})}{n}$$

Dimana :

$\sigma i^2$ = Varians butir pertanyaan ke-n

$\Sigma Xi$= Jumlah skor jawaban subyek untuk butir pertanyaan ke-n

Suatu instrument variabel dikatkan reliabel jika nilai koefisie reliabilitas bernilai positif. Makin besar nilai koefsien reliabilitas menunjukkan makin handal instrument variable tersebut.

**Teknik Sampling**

Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan system sampling jenuh memperhatikan karakteristik populasi adalah homogen, artinya responden yang dijadikan unit penelitian yang mana semua anggota dari pihak populasi Dinas Pengelolaan Keuagan dan Aset Daerah kota Bandung. Berkaitan dengan itu pengambilan jumlah sampel dalam penelitian karena jumlah populasi yang sangat terbatas dan berjumlah 23 responden,"Teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi dari 23 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil". Sugiyono, (2007:96).

### 3.6.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Jadi pengertian populasi dalam statistic tidak terbatas pada sekelompok/kumpulan orang – orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi focus perhatian suatu kajian. Suatu pengamatan/*survey* terhadap seluruh anggota populasi disebut sensus. (Harinaldi 2005)

Berkaitan dengan itu, Sugiyono (2002:72) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Dalam penelitian ini digunakan sebagai populasi adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bagian akuntansi sebanyak 23 orang.

### 3.6.2 Sampel

Dalam penelitian ini Seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 23 orang. Menurut Sugiyono (2008:116) "sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sedangkan menurut Sugiyono (2002:73), yang dimaksud dengan sampel adalah "bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu".

## 3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2009:6), metode survei adalah sebagai berikut:

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) mendefinisikan kuesioner sebagai berikut:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), uji coba dilakukan sebagai berikut:

"Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian".

### 3.8 Metode Pengujian Data

#### 3.8.1 Metode Analisis data Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variable penelitian. Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel / sub variabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
c. Dihitung skor setiap variabel/sub variabel = rata-rata dari total skor
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut :

$$\text{Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:45)

#### 3.8.2 Rancangan Analisis Verifikatif

Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan pendekatan verifikatif. Terlebih dahulu dilakukan tabulasi dan memberikan nilai sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal. Untuk teknik perhitungan data kuesioner yang telah diisi oleh responden digunakan *skala likert* dengan cara memberikan nilai pemboboton 5-4-3-2-1 untuk jenis pertanyaan positif maupun negetif.

Data yang digunakan untuk variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X), Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Z) merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan menggunakan skala ordinal. Penelitian ini menggunakan metode korelasi *pearson product moment* yang

harus menggunakan data interval. Untuk memenuhi persyaratan prosedur tersebut data ordinal diubah ke dalam bentuk interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) *Method of Successive Interval* (MSI), yaitu :

> "Metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval".

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa *Method of Successive Interval* (MSI) merupakan alat untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Adapun di dalam proses pengolahan data MSI tersebut, peneliti menggunakan bantuan *Additional Instrument* (*Add-Ins*) dari Microsoft Excel 2010. Untuk mengubah data tersebut langkah-langkahnya adalah:

a. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban responden pada setiap pernyataan
b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi frekuensi (f) dengan jumlah responden
c. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban
d. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan setiap pilihan jawaban
e. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{Means of Interval} = \frac{\text{Density at Lower limit} - \text{Density at Upper Limit}}{\text{Area at Below Density Upper Limit} - \text{Area at Below Lower Limit}}$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:47)

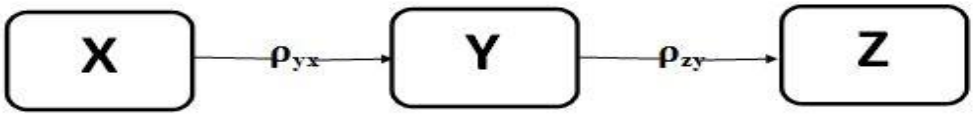
Keterangan:

| | |
|---|---|
| *Density at Lower Limit* | = kepadatan batas bawah |
| *Density at Upper Limit* | = kepadatan batas atas |
| *Area Below Upper Limit* | = daerah dibawah batas atas |
| *Area Below Upper Limit* | = daerah dibawah batas bawah |

Selanjutnya analisis yang digunakan dalam metode penelitian verifikatif adalah :

**1. Analisis jalur (*Path Anlysis)***

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif juga menggunakan metode verifikatif. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat



uji statistik, yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Model analisis jalur, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Keterangan :
Z = Akuntabilitas Kinerja
Y = Kualitas Laporan Keuangan
X = Sistem Informasi Keuangan Daerah
$\rho_{yx}$ = Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan terhadap SIKD
$\rho_{zy}$ = Koefisien jalur Akuntabilitas Kinerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Langkah-langkah dalam menguji *path analysis* adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural
   a. Merumuskan Hipotesis
      i. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
      ii. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
   a. Persamaan Struktural
      Ada dua persamaan struktual yang dapat dibuat sesuai dengan kerangka pemikiran. Dua persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \rho_{YX}X + \rho_{Y\varepsilon 1}$$

$$Z = \rho_{ZY}Y + \rho_{Z}\varepsilon_{2}$$

Keterangan:
X = Sistem Informasi Keuangan Daerah
Y = Kualitas Laporan Keuangan
Z = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
$\rho$ = Koefisien Korelasi
$\varepsilon_1$ = *Unexplained Variance*
$\varepsilon_2$ = *Unexplained Variance*

**3.8.3 Uji Hipotesis**

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui

perhitungan analisis jalur dan korelasi. Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi.

Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Pada pengujian secara parsial apabila nilai koefisien jalur variabel yang sedang diuji tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur variabel yang sedang diuji sama dengan nol maka Ho diterima. Pada pengujian simultan apabila ada nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima. Langkah – langkah dalam analisisnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, yaitu hipotesis nol ($H_0$) yang diformulasikan untuk ditolak, dan hipotesis alternative ($H_a$) yaitu hipotesis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut:

a. $H_0$ : Pyx = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh SIKD terhadap kualitas laporan keuangan
   $H_a$ : Pyx ≠ 0 Artinya terdapat SIKD terhadap kualitas laporan keuangan
b. $H_0$ : Pzy = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
   $H_a$ : Pyx ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Kriteria pengujian

Jika terdapat nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka $H_0$ ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka $H_0$ diterima.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulannya, Sistem Informasi Keuangan Daerah (X) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Z).

## IV Hasil Penelitian

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Deskriptif Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 50,4% termasuk dalam kategori kurang (berada pada interval 36%- 52%). Hal ini berarti bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) masih kurang mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan.

#### 4.1.2 Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan

Dari tabel dapat diketahui bahwa skor tanggapan sebesar 460. Besaran 460 ini ekuivalen dengan 62,8%. Dilihat dari peresntase yang diperoleh Kualitas Laporan Keuangan masuk dalam kategori cukup. Besaran ini tidak mencapai 100% yang diharapkan. Sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual terdapat gap sebesar 37,2%. Gap ini menunjukkan Kualitas Laporan Keuangan masih belum mencapai tingkat ideal. Indikator yang penilaiannya paling kecil adalah indikator Dapat difahami. Indikator ini masuk dalam kategori kurang sedangkan relevan dan keandalan Kualitas Laporan Keuangan masuk dalam kategori baik (tinggi).

### 4.1.3 Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinilai masih belum optimal sehingga masih terdapat permasalahan terutama dalam pencapaian kinerja.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.846 dan termasuk kategori sangat kuat dengan besar pengaruh 50.4% . Hal ini berarti bahwa sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masih kurang sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan sebesar 49.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi seperti kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah yang baik akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan dengan optimal sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sejalan dengan tanggapan responden mengenai indikator dapat difahami yang masih dalam kategori rendah menjelaskan kesulitan mereka dalam pengoperasian sistem dan pengelolaan laporan keuangan masih belum memadai.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Deddi Nordiawan (2006) menyatakan bahwa SIKD diterapkan di lingkup pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SIKD diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Untuk penyempurnaan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan sistem yang memadai dan sumber daya manusia yang kompetan dibidangnya sehingga tidak

terjadi kendala baik dalam pengoperasian sistem maupun pengolahan laporan keuangannya. Sebaiknya pegawai pada bagian akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus memiliki pendidikan dan pengalaman dibidang keuangan dan sistem.

### 4.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan besar pengaruh 0.835 dan termasuk kategori sangat kuat dengan memberikan pengaruh sebesar 69.7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika kualitas laporan keuangan lebih meningkat lagi dalam pelaksanaannya maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 30.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti namun dapat diyakini turut mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kualitas aparatur pemerintah daerah, pengawasan dan sebagainya.

Menurut Urip Sntoso (2008) menyatakan bahwa secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Menurut Ruri Widiastuti (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya suatu entitas maka dari itu laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan, dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai, adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga PEMDA menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan. (Kepala perwakilan BPKP provinsi Jabar Tahria Syafrudin,2012). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kota Bandung khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum terlalu bersungguh-sungguh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan,andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Fenomena yang terjadi,

Laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung tahun anggaran 2013 diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) terkendala pencatatan aset yang masih banyak belum dilengkapi dokumen sehingga tidak bisa meraih opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Ridwan Kamil,2014). Hal ini sejalan dengan persentase total tanggapan responden pada indikator pencapaian kinerja sebesar 51.3% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini berarti bahwa review atas prestasi kinerja yang dilaporkan belum ideal.

Diperlukan pengawasan dari internal auditor dalam memantau pembuatan laporan keuangan sehingga dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkan karena dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

## V Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandung, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah di Kota Bandung. Kualitas laporan keuangan yang belum mencapai tingkat ideal karena penyusunan laporan keuangan belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, ditandai dengan:
   a. Penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah.
   b. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan.
   c. Masih adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan berulang tanpa diketahui apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.
   d. Masih adanya peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas laporan keuangan.
2. Kualitas informasi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandung. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah karena masih terdapat permasalahan terutama dalam pencpaian kinerja, ditandai dengan:
   a. Penetapan target yang direncanakan masih belum optimal untuk dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja.
   b. Pengukuran kinerja dinilai belum mencapai tingkat ideal
   c. Evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil kinerja belum dilakukan secara maksimal sehingga hasilnya belum mencapai tingkat ideal.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kualitas SDM dibidang akuntansi dan keuangan dengan cara memberikan pelatihan khusus sehingga dengan diadakan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai di DPKAD kota Bandung.
2. Ditetapkan sanksi disiplin yang tegas pada pegawai yang lalai dalam tugas agar mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pada DPKAD kota Bandung.
3. Bagi DPKAD kota Bandung diharapkan dapat berkomitmen terhadap kompetensi SDM dengan cara menambah jumlah pegawai yang memiliki kompetensi lebih dibidang akuntansi dan keuangan. Sehingga dengan adanya penambahan jumlah pegawai yang kompeten dibidangnya diharapkan mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
4. Diperlukan beberapa perbaikan undang-undang yang mengatur tentang keuangan dan sistem yang akan akan diterapkan pada pemda sehingga pemda dapat konsisten dan tidak ada lagi peraturan yang bertabrakan.

### 5.2.2 Saran Pengembangan Ilmu

Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menguji variabel-variabel lain yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan daerah, menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi.* Salemba Empat : Jakarta.

Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah:Konsep dan Aplikasi Sesuai standar Akuntansi Pemerintah*. ALFABETA: Bandung.

Abdul Hafiz Tanjung.2012.*Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*.Bandung: Alfabeta

Agus Widarsono. *Implementasi sistem akuntansi Keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah terhadap pengawasan dan kinerja pemerintah daerah* . Jurnal Akuntansi dan bisnis Vol, 9 no 1 Febuari 2009 21

Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta : Akademia.

Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari. 2004 *Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah.*

Bastari Imam, 2004. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta

Deddi Nordiawan & Ayuningtyas hertianti.(2011). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta:Salemba Empat.

Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadyah Malang.

Irvan Permana. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas*. Bandung: UNIKOM

Jonathan Sarwono & Ely Suhayati. 2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS.* Graha Ilmu : Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Murtanto & Winda Arum Hapsari. *Pengaruh Pemahaman sistem akuntansi keuangandaerah dan pengelola keuangan terhdap kinerja satuan pemerintah daerah (survey kabupaten Maluku)* Jurnal ISSN 1410-8623

Narimawati Umi, Sri Dewi Anggadini, dan Lina Ismawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Ganesis

Narimawati, Umi. 2010. metode penelitian *:Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Genesis

Umi,Narimawati Dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis

Renyowijoyo, Muidro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Riduan & Engkosahmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan Dan Memakai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

_____- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_____- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

_____- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

_____- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

http://www.merdeka.com/uang/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-belum-ada-kemajuan.html

BPK RI. 2012. *Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD TA 2011: BPK RI berikan opini WTP untuk Pemprov Jabar dan Pemkot Banjar,* dari http://bandung.bpk.go.id/web/?p=3932